

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil Perhitungan Rasio Benchmark Perusahaan tahun 2014-2016 dibandingkan dengan Rasio Benchmark pada SE - 11/PJ/2010 Tentang Penetapan Rasio Total *Benchmarking* Tahap II milik Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan yang masuk kategori Wajar dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah PT Delta Djakarta (DLTA), PT Multi Bintang Indonesia (MLBI), PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company (ULTJ) karena memiliki hasil persamaan di atas standar Direktorat Jenderal Pajak sedangkan untuk kategori Tidak wajar dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), PT Indofood Sukses Makmur (INDF), PT Mayora Indah (MYOR), PT Nippon Indosari Corpindo (ROTI), PT Sekar Laut (SKLT) karena memiliki hasil Perhitungan Rasio Benchmark di bawah standar Direktorat Jenderal Pajak.
2. Berdasarkan hasil Perhitungan Rasio Benchmark Perusahaan tahun 2014-2016 dibandingkan dengan Rasio Benchmark Rata-rata Industri, perusahaan yang masuk kategori Wajar dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah PT Delta Djakarta (DLTA), PT Multi Bintang Indonesia (MLBI), PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company

(ULTJ) karena memiliki hasil persamaan di atas standar Direktorat Jenderal Pajak sedangkan untuk kategori Tidak wajar dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), PT Indofood Sukses Makmur (INDF), PT Mayora Indah (MYOR), PT Nippon Indosari Corpindo (ROTI), PT Sekar Laut (SKLT) karena memiliki hasil Perhitungan Rasio Benchmark di bawah standar Direktorat Jenderal Pajak

## **5.2 Saran**

1. Bagi Dirjen Pajak hendaknya melakukan pembaharuan mengenai rasio-rasio yang digunakan dalam analisis benchmarking dan disesuaikan dengan rasio yang terdapat dalam Surat Edaran Benchmark Behavior Methods sehingga proses analisa yang dilakukan guna pengawasan dapat lebih relevan;
2. Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada Benchmark, tidak selalu berarti bahwa Wajib Pajak tersebut tidak melakukan kewajibannya dengan benar. Namun perlu melakukan analisa mendalam terhadap bisnis Wajib Pajak.